

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 BAGI AKUNTAN PUBLIK

Piety Santa Sari Siahaan¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PP 43/2015 bagi Akuntan Publik di Indonesia, menganalisis alasan mendalam pembentukan PP 43/2015, menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip dasar kode etik kerahasiaan, serta mengetahui apakah penerapannya sudah dilakukan oleh Akuntan Publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh dengan dilakukannya wawancara semi terstruktur dan observasi. Adapun untuk memperoleh data sekunder menggunakan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah Akuntan Publik diharapkan dapat membantu Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam meminimalisir tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan mendeteksi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan korporasi sebagai kliennya serta sebagai upaya mitigasi risiko bagi profesi tersebut. PP 43/2016 tidak bertentangan dengan prinsip dasar etika profesi kerahasiaan Akuntan Publik. Penerapan PP 43/2015 belum dilakukan oleh Akuntan Publik di Indonesia dikarenakan beberapa keterbatasan dalam pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan klien serta belum terbentuknya regulasi pendukung seperti prinsip *Know Your Client* (KYC), tata cara penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan sanksi tegas bagi Akuntan Publik oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) untuk membuat PP 43/2015 dapat *fully implemented*.

Kata kunci: PP 43/2015, transaksi keuangan mencurigakan, Akuntan Publik, PPATK, pencucian uang.

¹ Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Bakrie

AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT LAW NUMBER 43 YEAR 2015 FOR PUBLIC ACCOUNTANT

Piety Santa Sari Siahaan²

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of PP 43/2015 for Public Accountant in Indonesia, to analyze in-depth reasons why PP 43/2015 established, to analyze congruity between PP 43/2015 with the fundamental ethical principle of confidentiality of Public Accountant and to determine whether the implementation of PP 43/2015 has been committed by Public Accountant in Indonesia. The method used for this research is descriptive qualitative. Primary data obtained by doing semi-structured interviews and observation. And then, for obtaining the secondary data used library research.

One of the result of this research is Public Accountant are expected to help PPATK in minimizing money laundering in Indonesia by detect and report suspicious financial transactions of corporate as it's client. PP 43/2015 does not contradict with the fundamental ethical principle of confidentiality of Public Accountant in Indonesia. Public Accountant have not implemented PP 43/2015 due to some limitations in the detection of suspicious financial transactions process and government (Supervisory and Regulatory Agencies) has not set the supporting regulations such as Know Your Client's principles, systematic procedures for reporting suspicious financial transactions, and strict sanctions for Public Accountant to make PP 43/2015 can be fully implemented.

Keywords: PP 43/2015, suspicious financial transactions, public accountant, PPATK, money laundering

² Student of Universitas Bakrie, Accounting Major